Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

EFEKTIVITAS PROGRAM INTERVENSI GIZI DI DESA PALIMBANGAN KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Della Wulandari[1], Jumaidi[2], Ahmad Baihaqi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: dellawulandari298@gmail.com

ABSTRAK

Upaya menekan angka stunting di Desa Palimbangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terus dioptimalkan lewat pemanfaatan alokasi Dana Desa, meskipun operasional program Posyandu Balita di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman orang tua serta kendala koordinasi antarpihak. Studi deskriptif kualitatif ini bertujuan mengevaluasi tingkat efektivitas program intervensi gizi tersebut sekaligus memetakan faktor-faktor penentunya. Peneliti menjaring data melalui metode observasi, dokumentasi, serta wawancara bersama sebelas informan terpilih, lalu menguji validitasnya lewat teknik triangulasi demi menjamin keabsahan data ilmiah. Berdasarkan analisis terhadap lima indikator kinerja, kemampuan para kader dalam memantau tumbuh kembang anak serta mendistribusikan program pemberian makanan tambahan (PMT) dinilai sudah berjalan efektif. Kepuasan warga dan penyerapan anggaran pun tergolong baik, kendati angka kehadiran balita belum sepenuhnya maksimal. Secara mendasar, hambatan yang ada berakar dari rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta kekeliruan pola asuh yang memicu minimnya kesadaran kesehatan. Namun, kendala tersebut berhasil diredam berkat sokongan kuat pemerintah desa, keaktifan tenaga medis, serta konsistensi kader kesehatan. Ke depan, bidan desa disarankan memperluas jangkauan penyuluhan nutrisi secara berkala, sementara para ibu didorong meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi air bersih serta pola hidup sehat demi memutus rantai stunting.

Kata Kunci: Stunting, Posyandu Balita, Dana Desa

ABSTRACT

Efforts to reduce stunting rates in Palimbangan Village, Hulu Sungai Utara Regency, continue to be optimized through the utilization of Village Fund allocations, although the operationalization of the Posyandu Balita program in the field still faces challenges such as limited parental understanding and coordination constraints between parties. This qualitative descriptive study aims to evaluate the effectiveness of this nutrition intervention program and map its determining factors. Researchers collected data through observation, documentation, and interviews with eleven selected informants, then tested its validity using triangulation techniques to ensure scientific validity. Based on an analysis of five performance indicators, the cadres' ability to monitor child growth and development and distribute supplementary feeding programs (PMT) was deemed effective. Community satisfaction and budget absorption were also relatively good, although toddler attendance rates were not yet optimal. Fundamentally, existing obstacles stem from low levels of education, economic conditions, and incorrect parenting patterns that contribute to minimal health awareness. However, these obstacles were successfully mitigated thanks to strong support from the village government, active medical personnel, and the consistency of health cadres. Going forward, village midwives are advised to expand the reach of regular nutrition counseling, while mothers are encouraged to increase their awareness of clean water sanitation and healthy lifestyles to break the chain of stunting.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Keywords: *Stunting, Toddler Integrated Health Posts (Posyandu), Village Funds*

PENDAHULUAN

Arah mendasar dari pelaksanaan pembangunan nasional bertumpu pada penyusunan regulasi serta eksekusi program strategis yang berorientasi pada eskalasi kesejahteraan kolektif. Langkah simultan ini diupayakan demi mencetak generasi bangsa yang kompetitif, unggul, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Atas dasar tersebut, aksentuasi utama dalam pembentukan karakter peradaban bangsa diwujudkan melalui garansi pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat secara seimbang dan berkelanjutan. Kendati demikian, jalan menuju idealisme tersebut kerap terhambat oleh fenomena stunting, sebuah manifestasi gangguan nutrisi kronis yang sampai detik ini mengakar sebagai problematika sistemis dalam domain kesehatan masyarakat di Indonesia. Ketidakseimbangan derajat kesehatan di tatanan domestik ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh interaksi simultan antara variabel eksternal seperti sanitasi lingkungan yang buruk, serta variabel internal yang mencakup rendahnya kualitas dan kuantitas asupan gizi harian balita.

Degradasi kualitas fisik akibat stunting mengancam masa depan generasi muda mengingat manifestasi klinis kegagalan pertumbuhan ini berakar dari defisit nutrisi jangka panjang yang sering kali bermula sejak fase gestasi di dalam kandungan, meski dampaknya baru teridentifikasi secara visual saat anak menginjak usia dua tahun. Hambatan ini tidak sekadar menyerang aspek antropometri atau tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya, namun secara destruktif mengganggu konektivitas sel saraf dan kapasitas kognitif anak. Dalam skala makro, akumulasi dari kegagalan tumbuh kembang ini berpotensi mendegradasi mutu modal manusia (*human capital*) serta memperlemah pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara, sehingga mereduksi daya saing bangsa di kancah global. Merespons urgensi tersebut, pemerintah mengonsolidasikan kebijakan penanggulangan dari level eksekutif tertinggi hingga jajaran birokrasi terkecil di tingkat desa melalui penguatan regulasi Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 yang diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang secara eksplisit membagi skema penanganan menjadi intervensi spesifik untuk penanganan tak langsung dan intervensi sensitif untuk akar penyebab langsung.

Implementasi kebijakan nasional tersebut diturunkan secara operasional oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, yang mengalokasikan pembiayaan preventif stunting melalui optimalisasi Dana Desa sebagai bentuk otonomi pembangunan kesehatan berbasis masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara ekspektasi regulasi dan kondisi empiris, di mana program pencegahan masih terbentur lemahnya jejaring koordinasi antara tenaga medis puskesmas, kader posyandu, dan keluarga sasaran. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman orang tua mengenai substansi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), ketidaktepatan sasaran distribusi logistik gizi, serta rendahnya literasi mengenai urgensi pemenuhan nutrisi mikro dan makro selama periode krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Adanya miskonsepsi sosiokultural di tengah masyarakat Desa Palimbangan yang menganggap kondisi fisik pendek sebagai faktor heriditer (keturunan) normal memicu rendahnya partisipasi aktif warga dalam forum kesehatan desa, sehingga melandasi urgensi pelaksanaan penelitian yang mendalam dengan tajuk ”EFEKTIVITAS PROGRAM INTERVENSI GIZI DI DESA PALIMBANGAN KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

Secara teoretis, program intervensi gizi tersebut merupakan pengejawantahan dari kebijakan publik, yang dipahami sebagai instrumen legalitas penguasa untuk mengarahkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat menuju arah yang lebih baik. Menurut Subarsono (2020:2), kebijakan publik ditafsirkan sebagai opsi-opsi strategis yang dirumuskan oleh pejabat berwenang atau institusi pemerintah pada domain-domain spesifik, termasuk dalam sektor pendidikan, ekonomi politik, tata kelola pertanian, industri, hingga sistem pertahanan negara. Selaras dengan pandangan tersebut, Dye dalam (Ravyansyah, 2022:10) mengemukakan premis mendasar bahwa kebijakan publik merupakan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

artikulasi dari segala hal yang diputuskan oleh otoritas pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan demi kepentingan umum. Penguatan konseptual ini juga didukung oleh Anderson dalam (Agustino, 2020: 16) yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan rangkaian tindakan bermaksud serta bertujuan tertentu yang diinisiasi dan dijalankan oleh seorang aktor atau kolektifitas aktor guna mengurai sekaligus memecahkan problematika riil yang tengah dihadapi masyarakat lingkungan sekitarnya.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan intervensi gizi ini sangat bergantung pada tingkat efektivitasnya dalam menekan prevalensi stunting di tingkat lokal. Efektivitas itu sendiri, dalam koridor pembangunan kesejahteraan, merepresentasikan rasio pencapaian target operasional yang telah dicanangkan sebelumnya di dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan pemikiran Richard M. Steers (2016:512), efektivitas dapat diartikan sebagai derajat kemampuan yang ditunjukkan oleh suatu organisasi dalam mengeksekusi seluruh fungsi tugas pokoknya sekaligus menggapai sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan. Pandangan konvergen diajukan oleh Bernard (2019:22) yang menitikberatkan efektivitas pada realisasi dari target-target performa yang telah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan. Lebih jauh, Wardiah (2016:244) memperluas cakupan istilah ini dengan mengaitkannya pada ketepatan adopsi strategi pencapaian, keberdayagunaan hasil akhir, nilai utilitas bagi masyarakat luas, tingkat fungsionalitas komponen organisasi, hingga parameter kepuasan dari pengguna layanan. Landasan sosiologis ini diperkuat oleh Subagyo dalam (Armida Silvia Asriel, 2018:258) yang memaknai efektivitas sebagai pemenuhan suatu kondisi yang konkret karena direncanakan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku tindakan tersebut.

Guna mengukur sejauh mana program posyandu dan intervensi gizi berjalan secara efektif di Desa Palimbangan, diperlukan parameter evaluasi yang komprehensif. Campbell dalam (Mulyawan, 2016:153) merumuskan enam dimensi krusial dalam pengukuran efektivitas organisasi, yang meliputi deteksi kesehatan internal institusi, fungsi diagnosis faktor penyebab performa kerja, penyediaan basis data perencanaan, instrumen komparasi antarlembaga, evaluasi intervensi pengembangan perilaku organisasi, serta identifikasi variabel anteseden yang memprediksi keberhasilan program. Komponen evaluatif ini dilengkapi oleh kerangka berpikir Robbins dalam (Patmawati, 2020:30) yang membagi pendekatan efektivitas ke dalam tiga model utama, yakni pendekatan pencapaian tujuan (*goal approach*), pendekatan sistem (*system approach*) yang menilai kelangsungan organisasi berdasarkan hubungan makro dengan ekosistem lingkungan, serta pendekatan konstituensi-strategis (*strategic-constituency approach*) yang mengukur kepuasan multidimensi dari para aktor mulai dari pimpinan, manajer, pekerja, kreditur, pemerintah, hingga masyarakat selaku konsumen utama layanan kesehatan.

Dalam konteks penanganan stunting di level terbawah, institusi yang memegang peranan paling vital adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai wujud nyata Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Posyandu yang terintegrasi mengoordinasikan pelayanan sosial dasar keluarga yang berfokus pada pengawasan tumbuh kembang balita secara berkala melalui kemitraan inklusif antara kader lokal dan tenaga medis profesional Puskesmas. Layanan komprehensif ini dijabarkan ke dalam tujuh klaster kegiatan utama, mencakup pemulihan masa nifas dan edukasi laktasi guna menekan mortalitas bayi, program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang memantau kondisi ibu hamil dari pengukuran lingkar lengan hingga deteksi risiko tinggi, serta pelayanan Keluarga Berencana (KB) melalui distribusi alat kontrasepsi dan konseling reproduksi. Lebih lanjut, klaster penimbangan balita secara rutin, penyenggaraan imunisasi dasar lengkap, tata laksana manajemen gizi melalui distribusi kapsul vitamin A serta tablet penambah darah, hingga edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai langkah preventif penanggulangan wabah diare menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas status gizi anak di desa.

Akar keberhasilan dari seluruh aktivitas posyandu tersebut bermuara pada pemahaman menyeluruh mengenai patofisiologi stunting serta model intervensi gizi yang diaplikasikan. Mengingat stunting dipicu oleh multifaktor seperti malnutrisi akut, infeksi patogen berulang, dan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

minimnya stimulasi psikososial sejak fase prekonsepsi, maka target Sustainable Development Goals (SDGs) poin kedua menetapkan eliminasi segala bentuk kelaparan dan malnutrisi sebagai prioritas mutlak. Penanganan masalah ini menuntut penggabungan integral antara intervensi gizi spesifik yang menyasar perbaikan gizi langsung pada kelompok sasaran seperti pemberian makanan tambahan bersumber pangan lokal berkualitas dan intervensi gizi sensitif yang menyentuh perbaikan kondisi makro di luar sektor kesehatan, seperti penyediaan jaringan air bersih dan jaminan sanitasi rumah tangga. Keberhasilan penyatuan kedua rumpun intervensi inilah yang menjadi indikator utama dalam menguji efektivitas program kesehatan di Desa Palimbangan demi melahirkan generasi yang bebas dari ancaman kegagalan pertumbuhan kronis.

METODE

Penetapan lokus penelitian memegang peranan krusial sebagai fondasi ilmiah dalam menjamin validitas, akuntabilitas, serta otentisitas data empiris yang dihimpun selama proses investigasi lapangan. Fokus spasial dalam penelitian ini secara spesifik ditetapkan pada Posyandu Cempaka yang beralamat di wilayah RT 02, Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan kode pos 71471. Untuk mengupas tuntas fenomena efektivitas intervensi tersebut, studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang didesain secara khusus untuk memahami, mengurai, serta menginterpretasikan kedalaman fenomena sosial atau dinamika kemasyarakatan melalui deskripsi tekstual yang sistematis demi mengonstruksi proposisi teoretis yang kuat. Konstruksi metodologis ini sejalan dengan tesis yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam (Abdussamad, 2021: 30), yang menegaskan bahwa prosedur penelitian kualitatif sejatinya dirancang untuk menghasilkan data deskriptif yang kaya, baik berupa artikulasi verbal tertulis maupun tuturan lisan dari subjek yang diamati, serta mencakup rekaman perilaku faktual yang diarahkan pada latar sosial maupun profil individu secara holistik dan menyeluruh. Penerapan metodologi ini secara substansial meniscayakan peneliti untuk bergerak dalam kondisi lingkungan yang sepenuhnya alamiah (*natural setting*) tanpa adanya rekayasa laboratorium, sehingga data yang teracumulasi murni mencerminkan realitas kualitatif di lapangan.

Operasionalisasi studi ini secara spesifik diklasifikasikan ke dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif, sebuah desain yang berorientasi pada penyajian potret realitas secara objektif tanpa melakukan pengujian statistik atau manipulasi variabel. Merujuk pada pemikiran Arikunto dalam (Zellatifannya dan Mudjiyanto, 2018: 84), penelitian deskriptif dikonseptualisasikan sebagai sebuah upaya ilmiah yang mengemban misi utama untuk mengumpulkan, merangkum, dan menyusun peta informasi aktual mengenai status dari suatu gejala sosial atau fenomena spesifik yang sedang berlangsung pada saat proses penelitian tersebut dilaksanakan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, rancangan deskriptif kualitatif ini sama sekali tidak memiliki tendensi untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis tertentu, melainkan murni memfokuskan tujuannya untuk memaparkan apa adanya mengenai karakteristik variabel, dinamika gejala, atau konstelasi keadaan sosiologis secara alamiah. Melalui implementasi desain deskriptif ini, peneliti dapat melakukan rekonstruksi ilmiah yang komprehensif atas situasi riil, jalinan interaksi, pola aktivitas, konvergensi pandangan, artikulasi sikap sosiokultural yang tampak, hingga potensi friksi yang meruncing di tengah masyarakat, sehingga mampu menyajikan lukisan data yang sistematis, faktual, dan presisi mengenai hubungan-hubungan fenomena yang sedang diinvestigasi demi pencapaian target riset.

Konstruksi pembuktian ilmiah dalam riset ini ditopang oleh dualitas kategorisasi data yang mencakup data primer dan data sekunder guna menjamin kedalaman analisis. Data primer dalam konteks ini direpresentasikan oleh sekumpulan informasi otentik yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau objek penelitian di lapangan tanpa melalui perantara pihak ketiga. Dengan demikian, klasifikasi data primer ini murni dihimpun, diorganisasikan, dan diolah secara mandiri oleh peneliti melalui instrumen wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait di lokasi studi. Sebaliknya, data sekunder dimanfaatkan sebagai materi

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

pelengkap yang diekstraksi secara tidak langsung dari objek riset, melainkan bersumber dari media pendukung eksternal seperti literatur digital di internet, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta rujukan dokumen resmi milik otoritas desa demi menghadirkan komparasi teoretis yang lebih jernih mengenai jalannya intervensi gizi. Guna menavigasi proses perolehan data utama yang bersumber dari ekspresi verbal dan tindakan nyata manusia tersebut, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling* sebagaimana dirumuskan oleh Sugiono (2016: 85), yang menetapkan informan kunci secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan spesifik atas kapasitas kompetensi dan kedalaman penguasaan informasi subjek guna menyajikan data selengkap mungkin kepada penulis.

Desain operasional dalam penelitian ini diposisikan sebagai peta pemandu sekaligus instrumen strategis yang menstrukturkan proses pengumpulan data agar berjalan lebih sistematis, efisien, akurat, dan mudah diolah pada tahapan berikutnya. Indikator efektivitas program intervensi gizi di Desa Palimbangan diukur dengan mengadaptasi kerangka evaluasi teoretis yang diajukan oleh Campbell dalam (Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014: 96), yang menjabarkan lima parameter evaluatif yang menonjol. Dimensi pertama adalah keberhasilan program, sebuah tolok ukur yang menilai sejauh mana kapasitas operasional institusi kesehatan desa mampu mengeksekusi program kerja agar selaras dengan visi dan misi yang telah dicanangkan, di mana kinerjanya dipantau secara ketat melalui mekanisme prosedural di lapangan. Dimensi kedua bertumpu pada keberhasilan sasaran, yang memfokuskan perhatiannya pada aspek keluaran (*output*) guna melihat seberapa besar derajat ketercapaian target kebijakan yang diukur dari ketepatan distribusi dan adopsi program oleh kelompok rentan. Sementara itu, dimensi ketiga mengacu pada tingkat kepuasan terhadap program, sebuah kriteria subjektif yang melacak keberhasilan program kesehatan dalam memenuhi ekspektasi serta kebutuhan riil para pengguna layanan, di mana tingginya kualitas layanan yang dirasakan akan berbanding lurus dengan eskalasi kepuasan masyarakat terhadap posyandu.

Dua dimensi pamungkas dari kerangka operasional tersebut mencakup analisis komparatif tingkat input dan output serta tingkat pencapaian tujuan menyeluruh dari organisasi. Evaluasi terhadap rasio tingkat input dan output ini dilakukan dengan mengalkulasi secara cermat perbandingan antara alokasi sumber daya yang dimasukkan dengan hasil nyata yang dikeluarkan, di mana efisiensi tercapai jika capaian hasil melampaui besaran masukan, dan sebaliknya ketidakseimbangan masukan mengindikasikan program berjalan tidak efisien. Terakhir, pencapaian tujuan menyeluruh menguji sejauh mana organisasi posyandu mampu mengintegrasikan seluruh instrumen kriteria tunggal menjadi sebuah penilaian makro yang merefleksikan keberhasilan tata kelola pencegahan stunting. Guna mengoperasionalkan variabel-variabel teoretis tersebut menjadi data empiris, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data terpadu yang diawasi melalui aktivitas observasi terstruktur. Sesuai dengan premis yang dikemukakan oleh Hadi dalam (Fauzi dkk., 2022: 81), observasi ditafsirkan sebagai sebuah proses kompleks yang mengintegrasikan berbagai fenomena biologis dan psikologis manusia secara simultan, di mana fungsi pengamatan visual yang tajam serta kekuatan ingatan yang sistematis menjadi pilar utama peneliti untuk merekam relevansi antara klaim lisan informan dengan realitas objektif yang berlangsung di lapangan.

Selain pengamatan visual, pengumpulan data verbal yang mendalam dieksekusi melalui teknik wawancara semi-terstruktur yang bersifat fleksibel namun tetap terarah pada substansi penelitian. Pendekatan dialogis ini mengacu pada konseptualisasi Moleong dalam (Ibrahim, 2018: 88), yang menegaskan bahwa wawancara merupakan sebuah bentuk percakapan yang diorientasikan pada maksud dan tujuan tertentu dengan melibatkan interaksi dialektis antara dua pihak, yakni pewawancara sebagai komunikator yang mengajukan serangkaian pertanyaan strategis dan terwawancara selaku informan yang memberikan konfirmasi jawaban atas pertanyaan tersebut. Guna melengkapi kekayaan data verbal dan visual yang telah diperoleh, peneliti melengkapinya dengan teknik dokumentasi yang menyasar pada penelusuran arsip, catatan perkembangan balita, serta berkas formal organisasi posyandu. Teknik ini dipandu oleh teori Ibrahim dalam (metode penelitian, 2018: 93) yang mendefinisikan dokumentasi sebagai seluruh bentuk instrumen pembuktian autentik

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mengenai suatu peristiwa historis maupun aktivitas institusional, yang wujudnya dapat berupa catatan tertulis, dokumen resmi, lembar transkrip, rekaman audio, hingga dokumentasi foto visual yang diproduksi secara formal dan terencana guna memperkuat kredibilitas temuan ilmiah di lapangan.

Seluruh data kualitatif yang telah terhimpun dari lapangan tidak akan memiliki makna ilmiah tanpa adanya penerapan teknis analisis data yang rigid, sistematis, dan interaktif. Riset ini mengadopsi model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiono (2016: 246), yang membagi proses analisis ke dalam tiga alur kegiatan yang saling berkesinambungan. Fase pertama adalah kondensasi data (*data condensation*), sebuah proses penyaringan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan menjadi bentuk ringkasan yang padat, informatif, namun tetap mempertahankan esensi dan relevansinya bagi fokus penelitian. Fase kedua diwujudkan melalui penyajian data (*data display*), yakni pengorganisasian sekumpulan informasi yang terstruktur ke dalam teks naratif, matriks, jaringan kerja, maupun bagan skematis guna memudahkan peneliti dalam melihat pola hubungan antardata sekaligus membuka peluang bagi penarikan kesimpulan yang logis. Tahapan akhir dari siklus ini adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*), di mana kesimpulan teoretis awal yang ditarik masih bersifat tentatif dan akan terus diuji validitasnya secara konsisten melalui bukti-bukti empiris yang kuat saat peneliti kembali ke lapangan demi menghasilkan simpulan yang benar-benar kredibel.

Untuk menjamin bahwa seluruh konstruksi temuan ilmiah dalam penelitian kualitatif ini terhindar dari bias subjektivitas dan memiliki tingkat kepercayaan yang absolut, peneliti menerapkan uji kredibilitas data yang ketat. Berdasarkan kerangka metodologis Sugiyono (2016: 270), pengujian tingkat kepercayaan hasil riset kualitatif wajib ditempuh melalui serangkaian instrumen validasi yang komprehensif. Implementasi uji kredibilitas dalam studi ini diaplikasikan melalui enam langkah sistematis: pertama, perpanjangan pengamatan untuk melakukan re-cek validitas data ke lapangan hingga mencapai titik jenuh; kedua, peningkatan ketekunan berupa pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan demi merekam kronologi peristiwa secara presisi; ketiga, triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna melakukan pembandingan silang atas data dari berbagai perspektif; keempat, pemanfaatan bahan referensi berupa alat bukti digital rekaman suara dan foto; kelima, analisis kasus negatif dengan mengeksplorasi data yang kontradiktif dengan temuan mayoritas; serta keenam, pelaksanaan *member check* untuk mencocokkan kembali transkrip data dengan informan pemberi informasi awal demi kepastian keselarasan data.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Intervensi Gizi di Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading

1. Keberhasilan Program

a. Kemampuan Melaksanakan Program

Pelaksanaan sebuah program esensinya merupakan rangkaian tindakan terstruktur demi mewujudkan tujuan yang telah dirancang. Dalam konteks intervensi gizi di Desa Palimbangan, perencanaan program Posyandu berfokus pada optimalisasi peran para kader. Berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, performa para kader dalam menjalankan program ini terbukti sangat efektif. Mereka mampu menyajikan pelayanan yang prima serta memberikan edukasi yang aplikatif kepada warga. Bentuk konkretnya meliputi penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) atau Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta penyuluhan nutrisi agar para orang tua dapat menduplikasi menu sehat tersebut untuk anak di rumah. Tak pelak, kader memegang posisi krusial sebagai penggerak utama seluruh roda kegiatan di Posyandu.

Keberhasilan di tingkat tapak ini sejalan dengan kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Campbell J.P (2014:96-97). Teori tersebut menegaskan bahwa

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

efektivitas suatu program sangat bergantung pada kompetensi dan kapasitas para implementor dalam mengelola program itu sendiri demi meraih target yang telah disepakati. Di Desa Palimbangan, kecakapan para kader dalam mengorganisasi kegiatan dan mendekati masyarakat menjadi faktor penentu utama. Ketika para pelaksana memiliki kapabilitas yang mumpuni, program intervensi gizi tidak sekadar menjadi rutinitas formal, melainkan mampu mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan dan membawa perubahan perilaku yang nyata demi menekan angka masalah gizi pada balita.

b. Koordinasi antara tenaga Kesehatan

Keberhasilan implementasi program intervensi gizi sangat bergantung pada sinergi yang solid antara praktisi kesehatan, kader posyandu, dan jajaran pemerintah desa. Kolaborasi yang harmonis antarlintas sektor ini menjadi kunci utama agar seluruh rangkaian kegiatan di lapangan dapat terealisasi tanpa hambatan berarti. Ketika jalur koordinasi terbangun dengan kuat, setiap kendala atau dinamika yang muncul di tengah masyarakat dapat dicarikan solusi bersama secara cepat. Hal ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu pelayanan publik yang jauh lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Namun, realitas di lapangan berdasarkan data wawancara, pengamatan langsung, serta telaah dokumen menunjukkan bahwa pola kemitraan yang ada saat ini masih jauh dari kata optimal. Lemahnya komunikasi antar-stakeholder mengakibatkan capaian program perbaikan gizi anak belum mampu memberikan hasil yang masif. Oleh sebab itu, penguatan manajemen komunikasi dan intensitas forum koordinasi mutlak diperlukan demi mendongkrak performa program di masa mendatang, khususnya dalam menekan angka masalah gizi pada balita. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Campbell (2014:96-97) yang menegaskan bahwa tingkat efektivitas suatu program kerja sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi serta keterpaduan tindakan di antara para pemangku kebijakan yang terlibat.

2. Keberhasilan Sasaran

a. Pemahaman Masyarakat

Tingkat pemahaman kolektif warga setempat mengenai esensi program posyandu di wilayah mereka masih tergolong sangat minim. Berdasarkan data komprehensif yang dihimpun melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta telaah dokumen resmi, disimpulkan bahwa internalisasi program ini berjalan tidak efektif. Hambatan utama bersumber pada miskonsepsi yang mengakar di kalangan publik, di mana fenomena tengkes (*stunting*) kerap kali disalahartikan murni sebagai dampak dari faktor hereditas atau genetik semata. Kendati tim medis puskesmas (bidan) bersama para kader kesehatan telah berulang kali menggelar forum sosialisasi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum menginternalisasi urgensi dari agenda intervensi nutrisi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi berupa edukasi yang lebih masif, berkala, dan interaktif guna mengikis paradigma keliru tersebut dan mendongkrak kesadaran publik secara signifikan.

Realitas empiris yang ditemukan di lokasi penelitian ini secara gamblang bertolak belakang dengan postulat yang dikemukakan oleh Campbell (2014:96-97) mengenai indikator keberhasilan suatu kebijakan publik. Dalam teorinya mengenai efektivitas organisasi dan program, Campbell menegaskan bahwa ketercapaian target sebuah program linear dengan kedalaman pemahaman dari kelompok sasaran (*target groups*) itu sendiri terhadap visi yang dijalankan. Kegagalan sebagian masyarakat dalam menyerap esensi pemulihan gizi di posyandu ini membuktikan adanya kesenjangan (*gap*) antara implementasi kebijakan dengan penerimaan psikologis masyarakat. Dengan demikian, ketidaksesuaian ini menegaskan bahwa kuantitas penyuluhan saja tidak cukup menjamin

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

efektivitas program jika tidak dibarengi dengan perubahan persepsi mendasar pada komunitas lokal.

b. Prosedur Organisasi

Mekanisme pelaksanaan program pada dasarnya merupakan sebuah rangkaian tahapan terstruktur dan saling berkaitan yang diorientasikan untuk mencapai target tertentu. Berdasarkan data yang dihimpun melalui teknik wawancara, pengamatan langsung, serta pencatatan dokumen di lapangan, runtunan prosedur dalam program intervensi perbaikan gizi telah berjalan secara efektif. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan adanya panduan sistematis pada setiap aktivitas penanggulangan stunting. Dalam praktiknya, pemantauan kondisi nutrisi diawali saat anak balita mengunjungi posyandu untuk melakukan pengukuran berat serta tinggi badan. Selanjutnya, petugas kesehatan akan mengevaluasi indikator Berat Badan menurut Umur (BB/U) melalui Kartu Menuju Sehat (KMS). Langkah berikutnya melibatkan rekapitulasi data Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) oleh staf ahli gizi. Guna mengidentifikasi indikasi stunting, fluktuasi angka tersebut disinkronkan dengan standar baku TB/U, di mana balita yang masuk dalam klasifikasi pendek serta sangat pendek akan langsung diprioritaskan dalam penanganan.

Rangkaian temuan empiris di lokasi penelitian ini sejajar dengan pandangan konseptual yang diusung oleh Campbell (2014:96-97). Teori tersebut menegaskan bahwa tingkat efektivitas sebuah program intervensi sosial secara substansial dapat diukur dari bagaimana ketepatan prosedur yang diaplikasikan dalam merealisasikan target capaian yang telah direncanakan. Pola eksekusi yang tertata di posyandu ini membuktikan bahwa kejelasan alur kerja operasional menjadi pilar utama dalam mendeteksi sekaligus meminimalisasi risiko gangguan tumbuh kembang anak secara dini.

3. Kepuasan Terhadap Program

a. Pemenuhan Kebutuhan

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar pada dasarnya diwujudkan melalui penyediaan barang ataupun jasa yang mampu mengakomodasi serta memberikan kepuasan bagi masyarakat. Kendati demikian, berdasarkan temuan data di lapangan yang dihimpun melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, menunjukkan bahwa realisasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di wilayah ini belum berjalan secara optimal. Kendala utama terletak pada kurangnya inovasi dan variasi menu pangan yang disajikan dalam setiap periodisasi bulanan. Implikasinya, tingkat kepuasan publik terhadap intervensi gizi tersebut masih tergolong rendah, khususnya di kalangan orang tua yang memiliki anak dengan kondisi tengkes (*stunting*), karena merasa manfaat operasional program belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil anak mereka.

Fenomena ketidakefektifan ini berkolerasi kuat dengan premis teoritis yang dikemukakan oleh Campbell (2014:96-97), yang menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan sebuah program intervensi sosial sangat ditentukan oleh parameter kepuasan para sasarannya. Dalam pandangan tersebut, efektivitas pencapaian target baru dapat terwujud apabila mekanisme distribusi dan substansi bantuan yang disalurkan mampu menyentuh ekspektasi serta memberikan kepuasan nyata bagi penerima manfaat. Dengan demikian, minimnya diversifikasi menu PMT di desa ini menjadi pemicu utama munculnya persepsi negatif dan ketidakpuasan masyarakat, yang pada akhirnya mengonfirmasi bahwa program penanggulangan *stunting* di tingkat lokal tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

b. Kualitas Jasa atau Layanan

Mutu pelayanan prima senantiasa menempatkan kepuasan optimal publik sebagai orientasi utama, sekaligus menjadi fondasi fundamental dalam perumusan visi dan misi

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

sebuah institusi. Berdasarkan data yang dihimpun melalui teknik observasi mendalam, wawancara komprehensif, serta studi dokumentasi di lokasi penelitian, kualitas kinerja yang diselenggarakan oleh para aparatur dapat dikategorikan berada pada tingkat yang cukup efektif. Hal ini tercermin dari dedikasi dan upaya maksimal yang ditunjukkan oleh para pegawai dalam memberikan standardisasi pelayanan terbaik demi merespons kebutuhan masyarakat di lapangan secara optimal.

Fenomena empiris mengenai keberhasilan pencapaian kinerja tersebut secara teoretis linear dengan premis yang dikemukakan oleh Campbell (2014:96-97). Dalam konseptualisasinya, ia menegaskan bahwa tingkat efektivitas keberhasilan suatu program kerja sangat berorientasi pada sejauh mana kualitas dimensi pelayanan yang diimplementasikan mampu menstimulasi kepuasan para target sasaran. Dengan demikian, korelasi positif antara aspek profesionalisme pelaksana dengan pemenuhan ekspektasi publik menjadi indikator mutlak dalam mengukur keberhasilan manajemen program yang dijalankan oleh organisasi kelembagaan tersebut.

4. Tingkat Input dan Output
   a. Ketersediaan Anggaran

Keberhasilan penanggulangan masalah stunting pada anak balita sangat bergantung pada sokongan finansial yang memadai. Alokasi dana ini memegang peran krusial dalam menggerakkan berbagai roda instrumen program di lapangan, mulai dari pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penyediaan suplemen vitamin, pemenuhan fasilitas alat kesehatan, hingga pembiayaan operasional serta transportasi bagi para kader. Selain itu, ketersediaan dana juga menjadi motor penggerak bagi kelangsungan edukasi dan penyuluhan berkala kepada masyarakat luas. Berdasarkan serangkaian data yang dihimpun peneliti melalui teknik interviu mendalam, pengamatan langsung, serta penelaahan dokumen di area riset, pemanfaatan anggaran operasional secara faktual telah berjalan selaras dengan regulasi baku yang berlaku di posyandu.

Realisasi anggaran tersebut secara konsisten telah menyasar pos-pos penting, khususnya pemenuhan gizi balita, alat penunjang kesehatan, insentif kader, serta stimulasi pengetahuan bagi para ibu. Jika dikorelasikan dengan perspektif teoretis, potret empiris di lapangan ini sejalan dengan pandangan Campbell J.P (2014:96-97). Ia menegaskan bahwa tingkat efektivitas sebuah kebijakan atau program kerja sangat ditentukan oleh daya dukung finansial yang dikelola secara tepat. Melalui ketersediaan anggaran yang proporsional inilah, suatu organisasi dapat mengukur secara objektif perbandingan antara kapasitas input yang dimiliki dengan pencapaian output yang dihasilkan secara riil.

   b. Pencapaian Target Program

Keberhasilan suatu program dinilai dari sejauh mana target yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya mampu direalisasikan demi mencapai tujuan akhir. Berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan pemrosesan dokumen, pelaksanaan program di lokasi penelitian terbukti telah berjalan secara efektif. Indikator efektivitas ini terlihat nyata dari kontribusi program yang signifikan dalam mempercepat penanganan kasus *stunting* di tingkat desa. Selain itu, inisiatif ini juga berhasil menggerakkan kesadaran warga, yang ditandai dengan melonjaknya partisipasi masyarakat dalam membawa anak balita mereka ke Posyandu. Dampak positifnya, pemantauan dan pelayanan kesehatan bagi generasi muda dapat diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan.

Secara teoritis, capaian positif di lapangan ini selaras dengan pemikiran Campbell (2014:96-97) mengenai pengukuran kinerja organisasi dan program. Ia menegaskan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

bahwa efektivitas sebuah program sangat bergantung pada kesesuaian antara aspek input dan output, yang diukur langsung melalui pemenuhan target-target operasional yang sudah dicanangkan sejak awal. Dalam konteks ini, ketepatan sasaran dan realisasi target penanganan kesehatan di desa menjadi bukti empiris bahwa alokasi sumber daya (input) telah dikelola dengan baik untuk menghasilkan dampak nyata (output). Sinkronisasi antara hasil riil di masyarakat dan kerangka teoritis ini menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga subtansial dalam membawa perubahan sosial.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh
   a. Tepat Sasaran

      Keberhasilan sebuah agenda atau program kerja sangat ditentukan oleh ketepatan implementasinya di lapangan. Namun, temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Desa Palimbangan menunjukkan bahwa penentuan target program pencegahan stunting di wilayah tersebut masih kurang efektif. Selama ini, intervensi yang berjalan baru berfokus pada pemulihan gizi anak melalui pemberian makanan tambahan (PMT) serta pendistribusian susu bagi ibu hamil. Padahal, jika merujuk pada regulasi formal yakni Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 cakupan prioritas dalam mengakselerasi penurunan stunting seharusnya menyasar kelompok yang lebih luas, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga pemantauan intensif pada anak usia 0-59 bulan. Akibat kurang komprehensifnya pemetaan target ini, penanganan balita yang mengalami kendala nutrisi menjadi tidak maksimal, sehingga program yang digulirkan belum mampu mendongkrak status gizi balita secara signifikan.

      Fakta di lapangan tersebut sejalan dengan pandangan Campbell (2014:96-97) mengenai dimensi efektivitas sebuah program. Menurut teori tersebut, tingkat keberhasilan suatu intervensi sangat bergantung pada keselarasan antara input dan output, yang diukur dari sejauh mana target-target operasional yang telah ditetapkan sebelumnya mampu dicapai secara riil. Dalam konteks pembenahan gizi di Desa Palimbangan, ketidakmampuan program dalam menjangkau seluruh elemen sasaran krusial menyebabkan adanya kesenjangan yang besar antara perencanaan awal dan hasil akhir. Oleh sebab itu, ketepatan dalam menentukan dan mengeksekusi prioritas sasaran menjadi kunci mutlak agar output yang dihasilkan dapat berkontribusi nyata terhadap perbaikan status kesehatan masyarakat lokal.

   b. Tujuan Program

      Keberhasilan suatu program dinilai dari sejauh mana target yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya mampu direalisasikan demi mencapai tujuan akhir. Berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan pemrosesan dokumen, pelaksanaan program di lokasi penelitian terbukti telah berjalan secara efektif. Indikator efektivitas ini terlihat nyata dari kontribusi program yang signifikan dalam mempercepat penanganan kasus *stunting* di tingkat desa. Selain itu, inisiatif ini juga berhasil menggerakkan kesadaran warga, yang ditandai dengan melonjaknya partisipasi masyarakat dalam membawa anak balita mereka ke Posyandu. Dampak positifnya, pemantauan dan pelayanan kesehatan bagi generasi muda dapat diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan.

      Secara teoritis, capaian positif di lapangan ini selaras dengan pemikiran Campbell (2014:96-97) mengenai pengukuran kinerja organisasi dan program. Ia menegaskan bahwa efektivitas sebuah program sangat bergantung pada kesesuaian antara aspek input dan output, yang diukur langsung melalui pemenuhan target-target operasional yang sudah dicanangkan sejak awal. Dalam konteks ini, ketepatan sasaran dan realisasi target

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

penanganan kesehatan di desa menjadi bukti empiris bahwa alokasi sumber daya (input) telah dikelola dengan baik untuk menghasilkan dampak nyata (output). Sinkronisasi antara hasil riil di masyarakat dan kerangka teoritis ini menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga subtansial dalam membawa perubahan sosial.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas program intervensi Gizi dalam pencegahan stunting di Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung
   a. Koordinasi antar tenaga kesehatan yang rendah
   b. Pola pemahaman masyarakat yang rendah
2. Faktor Penghambat
   a. Kegiatan Yang Berjalan Sesuai dengan Ketersediaan Anggaran
   b. Keterbatasan Sarana dan prasarana dalam pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Banua Lawas

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam mengenai program intervensi gizi di Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program pencegahan stunting ini telah berjalan dengan cukup efektif mengacu pada indikator keberhasilan menurut teori Campbell. Dari aspek keberhasilan program, para kader posyandu telah mampu menjalankan tugas-tugas krusial seperti pemantauan antropometri anak (berat dan tinggi badan), distribusi makanan tambahan (PMT), penyuluhan, serta pendampingan bagi ibu hamil dan balita secara konsisten. Kendati demikian, sinergi komunikasi antara bidan desa, perangkat desa, kader, dan warga masih memerlukan penguatan agar penyebaran informasi bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Sementara itu, dari sudut pandang sasaran program, pemahaman kolektif warga mengenai stunting sudah menunjukkan tren positif, walaupun edukasi mengenai pola makan gizi seimbang masih harus terus digalakkan bagi sebagian orang tua. Di sisi lain, standarisasi operasional posyandu terbukti berjalan sangat tertib mulai dari fase pengukuran hingga pencatatan Kartu Menuju Sehat (KMS). Tingkat kepuasan masyarakat pun berada pada kategori yang baik karena mereka merasakan langsung manfaat nyata dari layanan rutin, keramahan petugas, serta suplai vitamin dan gizi yang memadai. Kelancaran program ini juga tidak lepas dari dukungan finansial yang bersumber dari anggaran pemerintah desa untuk pengadaan logistik kesehatan, meskipun dari segi output, pemenuhan target capaian belum sepenuhnya maksimal akibat adanya sebagian warga yang belum berpartisipasi secara berkala. Secara menyeluruh, program ini dinilai tepat sasaran dalam membidik kelompok rentan dan telah berkontribusi besar dalam menekan risiko stunting di wilayah tersebut. Adapun dinamika yang memengaruhi efektivitas ini terbagi menjadi dua dimensi utama. Faktor penghambatnya berakar pada belum solidnya jaringan koordinasi lintas sektor yang terkadang memicu keterlambatan informasi, sedangkan faktor pendukung terbesarnya adalah komitmen pendanaan desa yang kuat dan berkelanjutan, sehingga menjamin seluruh agenda posyandu dan penyuluhan gizi dapat terus bergulir secara berkala demi mewujudkan generasi yang lebih sehat di Desa Palimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.

Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Anggara, S. (2018). *Kebijakan publik*. Pustaka Setia.

Badu, S. Q., & Djafri, N. (2017). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Ideas Publishing.

Candra, A. (2020). *Epidemiologi stunting*. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Eniningsih, et al. (2020). *Kebijakan*. Widina Bhakti Persada. *(Data judul belum lengkap.)*

Fauzi, A., et al. (2020). *Metodologi penelitian*. CV Pena Persada.

Hadiyansyah. (2018). *Kualitas pelayanan publik* (Edisi revisi). Gava Media.

Ibrahim. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Sekretariat Negara.

Kurniawan, A. (2015). *Transformasi pelayanan publik*. Pembaruan.

Mardiasmo. (2017). *Efisiensi dan efektivitas*. Andi.

Moleong, L. J. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mulyawan, R. (2016). *Birokrasi dan pelayanan publik*. UNPAD Press.

Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen birokrasi dan kebijakan*. *(Data penerbit belum lengkap.)*

Pasolong, H. (2017). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.

Patmawati, A. (2020). *Efektivitas program pencegahan stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang* (Skripsi sarjana tidak diterbitkan). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sumedang.

Rahayu, A., et al. (2018). *Study guide: Stunting dan upaya pencegahannya bagi mahasiswa kesehatan masyarakat*. CV Mine.

Ravyansyah, et al. (2020). *Kebijakan publik*. PT Global Eksekutif.

Satispi, E., & Mufidayanti, K. (2019). *Buku ajar kebijakan publik*. UMJ Press.

Schiagian, S. P. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Siagian, S. P. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Siswati, T. (2018). *Stunting*. Husada Mandiri.

Subarsono. (2022). *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Wahab, S. A. (2015). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi, 1*(2), 83–90.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. (2022). *Pedoman penyusunan dan penulisan skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.